

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dalam kegiatan industri jasa konstruksi pada beberapa aspek memerlukan manajemen atau pengelolaan yang dituntut memiliki kinerja yang berekspektasi pada kesempurnaan. Aktivitas untuk menciptakan sebuah manajemen dengan tujuan *good governance* dapat dicapai melalui sistem yang berkesinambungan, dimana sistem tersebut dilakukan dengan mengacu pada aktivitas pokok dalam manajemen konstruksi yaitu, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Seperti diketahui berakhirnya masa konstruksi ketika masa perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan telah dilakukan bukan berarti tanggungjawab terhadap bangunan yang telah dibangun selesai. Dalam manajemen yang baik bangunan harus tetap dilakukan *maintenance* secara berkala, termasuk dengan melakukan penilaian (*assessment*) untuk mengevaluasi kinerja bangunan, dimana aktivitas tersebut termasuk dalam proses pengendalian sebagai bagian dari garis besar aktivitas manajemen konstruksi. Evaluasi kinerja bangunan ini juga dapat dijadikan sebagai landasan perlu atau tidak dilakukan perbaikan kinerja bangunan atau justru diperlukannya bangunan baru. Kinerja bangunan lama yang tidak mungkin lagi secara teknis digunakan untuk mengantisipasi kinerja akibat fungsi baru atau perubahan beban.

Pengendalian/*controlling* merupakan tahap akhir dari rangkaian kegiatan manajemen proyek. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa program dan aturan kerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan penyimpangan paling minimal dan hasil paling memuaskan. Dalam pengendalian sendiri bentuk kegiatan yang biasa dilakukan yaitu: pengawasan (*supervise*), inspeksi (*inspection*) dan tindakan koreksi (*correction*). Tindakan koreksi

dimaksudkan untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap terhadap rencana yang telah ditetapkan untuk menyesuaikan dengan kondisi pelaksanaan.

Dalam rangka peningkatan industri jasa konstruksi yang diharapkan menjadi semakin baik, maka tindakan koreksi ini juga dapat dilakukan setelah bangunan beroperasi. Pada bangunan tersebut dilakukan evaluasi secara menyeluruh dari perencanaan, pengorganisasian, hingga bagaimana kinerjanya setelah beroperasi dengan maksud untuk peningkatan mutu/kualitas bangunan yang lebih baik di masa mendatang.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disamping target membangun 65 bendungan dalam 5 tahun juga terus meningkatkan jumlah tampungan air melalui pembangunan embung di seluruh Indonesia. Keberadaan embung selain untuk irigasi sawah juga bermanfaat untuk konservasi air yang dapat sebagai sumber air baku, sumber air bagi ternak terutama pada saat musim kemarau. Presiden Joko Widodo memberikan perhatian pada peningkatan jumlah embung di Indonesia dengan dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 2018 tentang Percepatan Penyediaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa. Tahun 2018 jumlah embung yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebanyak 103 embung. Dengan tambahan jumlah embung tersebut, maka selama 4 tahun (2015 – 2018) jumlah embung yang dibangun sebanyak 949 buah. (www.indonesiainfrastruktur.id).

Seiring berjalannya operasional suatu bangunan, seperti bangunan embung, diperlukan evaluasi kinerja yang menyangkut kelayakan keamanan dan kenyamanan dari segi teknis. Terjadinya alih fungsi bangunan, usia bangunan, perubahan lingkungan, dan lain sebagainya akan berakibat pada berubahnya kinerja bangunan secara langsung. Sebagai contoh adalah kasus Embung di Dusun Ngasemrejo, Desa Ngawu, Playen, Gunung Kidul hanya bertahan kurang lebih 3 bulan yang diduga karena tidak kuat menahan deras arus dan guyuran hujan.

Contoh lain yaitu sepuluh proyek pembangunan embung di Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran yang sedianya untuk mengairi pertanian menjadi tidak

bermanfaat karena kerusakan yang beruntun dan pada akhirnya dibiarkan terbengkalai padahal pemerintah sudah mengeluarkan uang milyaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) guna mendanai proyek tersebut di tahun anggaran 2016 (PENA, 2017).

Sebagian dari rencana proyek bangunan air yang dibuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah terealisasi bahkan telah beroperasi di antaranya adalah bangunan embung yang berada di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Jumlah bangunan embung yang ada di Kecamatan Ponjong ini tidak sedikit, oleh karenanya agar sarana dan prasarana embung tersebut dapat bermanfaat dan berfungsi dengan baik maka perlu dioperasikan sesuai dengan peruntukannya dan harus senantiasa dipelihara (Laporan Interim, 2016).

Dalam rangka mencegah contoh kasus-kasus di atas terjadi pada embung-embung yang ada di Kecamatan Ponjong, maka perlu dilakukan evaluasi pada kinerjanya. Pada penelitian ini akan dibahas berbagai mengenai masalah yang terdapat pada embung-embung tersebut, tingkat kerusakan dan fungsi, kegiatan operasi dan perawatan yang perlu dilakukan.

Berdasarkan data yang didapat dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak inventarisasi sementara embung sejumlah 328 buah menyebar di Kabupaten Sleman (6 buah), Kabupaten Bantul (5 buah), Kabupaten Kulonprogo (10 embung), Kabupaten Gunung Kidul (274 buah), Kabupaten Temanggung (5 buah), Kabupaten Kebumen (4 buah), Kabupaten Banyumas (13 buah), Kabupaten Purworejo (2 buah), dan Kabupaten Wonosobo (9 buah). Pada data inventarisasi tersebut dapat dilihat bahwa jumlah embung didominasi di wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

Ponjong adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul dengan luas 104,49 Km². Kecamatan Ponjong saat ini sedang mengembangkan wisata alam dataran tinggi berupa Embung di puncak Gunung Panggung, Desa Tambakromo. Ponjong memiliki ketinggian lebih kurang 500 meter di atas permukaan laut. Embung Gunung Panggung ini terletak di dusun Klepu, Tambakromo, Ponjong, Gunungkidul. Embung Gunung Panggung ini terletak di atas ketinggian dan berada di perbatasan antara Yogyakarta dan Jawa tengah (www.gedangsari.com). Beberapa waktu yang

lalu salah satu desa di kecamatan ini menjadi perhatian khusus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) luar negeri, karena kondisi alamnya yang masih asri dan potensial menjadi area wisata. Dalam rangka menunjang dan mempertahankan potensi baik yang ada, maka evaluasi kinerja pada penelitian ini akan lebih berfokus pada embung-embung di kecamatan ini.

Secara garis besar kerusakan embung dapat disebabkan oleh faktor alam, oknum yang tidak bertanggung jawab, maupun disebabkan oleh faktor kesalahan perencanaan sejak awal. Beberapa studi yang dilakukan menunjukkan kenyataan di lapangan, embung tidak berfungsi secara maksimal karena beberapa masalah, di antaranya yaitu tidak tersedianya air pada bangunan embung, terjadinya sedimentasi pada bangunan, pengkaratan pada bagian pintu *intake*, tumbuhnya rumput atau tanaman liar, serta kurangnya ketersediaan data yang ada di lapangan sehingga tidak tepatnya kegiatan operasi dan pemeliharaan.

Untuk itu perencanaan pengoperasian dan pemeliharaan bangunan embung perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan, dimana untuk membuat sebuah perencanaan pengoperasian dan pemeliharaan diperlukan data yang valid, artinya data benar-benar sesuai dengan data aset maupun data kondisi aktual yang meliputi; catatan aset embung, embung yang masih baik dan atau embung yang sudah rusak bila dioperasikan, embung yang masih baik dan atau embung yang sudah rusak untuk dipelihara.

Untuk melengkapi penelitian ini, maka perencanaan pengoperasian dan pemeliharaan juga didukung oleh perkiraan biaya Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan atau disebut juga dengan AKNOP. Dengan adanya AKNOP yang dianalisa berdasarkan survei, maka diharapkan biaya yang dianggarkan oleh pemerintah sesuai dengan perkiraan biaya yang direkomendasikan, sehingga biaya yang dialokasikan dapat tepat sasaran dan efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bangunan embung yang berada di Kecamatan Ponjong, diduga mengalami penurunan fungsi dan mengalami kerusakan, sehingga perlu diketahui:

1. Bagaimana kinerja bangunan-bangunan embung yang ada di Kecamatan Ponjong?
2. Berapa Angka Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) bangunan-bangunan embung yang ada di Kecamatan Ponjong?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kinerja bangunan-bangunan embung yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak di Kecamatan Ponjong.
2. Mengetahui perkiraan biaya Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) bangunan-bangunan embung di Kecamatan Ponjong.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.

1. Membantu pemerintah dalam menginventarisir dan mengetahui kondisi kinerja bangunan aset, khususnya bangunan-bangunan embung.
2. Sebagai rekomendasi bagi pemerintah terkait untuk memberikan perawatan secara tepat bagi embung yang mengalami disfungsi kinerja.
3. Dengan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) yang disajikan pada penelitian ini maka dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah terkait untuk mengalokasikan anggaran biaya secara tepat dan efektif.
4. Evaluasi kinerja yang dilakukan pada penelitian ini dapat menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable building*) untuk bangunan infrastruktur.

1.5 Batasan Penelitian

Sebelum melanjutkan penelitian maka terlebih dahulu ditentukan batasan-batasan penelitian yang meliputi, antara lain sebagai berikut:

1. Bangunan-bangunan embung yang di survei dan di evaluasi hanya pada wilayah Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul dan bangunan yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. (Lihat Gambar 1.1)
2. Penilaian dilakukan berdasarkan survei langsung di lapangan, dengan menganalisis fisik dan kinerja bangunan.
3. Data berupa pembobotan nilai berdasarkan survei yang dilakukan pada penelitian akan dibahas secara deskriptif.



Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kabupaten Gunung Kidul